

Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja APBD Kota Pekanbaru

Financial Ratio Analysis as a Tool for Measuring the Performance of the Pekanbaru City Regional Budget (APBD)

Suharyono

Politeknik Negeri Bengkalis

ARTICLE INFO

Article history:

Received 18 December, 2025

Revised 19 December 2025

Accepted 25 December 2025

Available online 29 December 2025

Keywords:

Local Own-Source Revenue; Regional Financial Performance; Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD); Financial Ratios; Local Government.

Kata kunci:

Pendapatan Asli Daerah; Kinerja Keuangan Daerah; APBD; Rasio Keuangan; Pemerintah Daerah.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam pembiayaan belanja daerah. Penurunan PAD serta kinerja pemerintah daerah tentunya memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan rasio desentralisasi fiskal, kemandirian daerah, efisiensi, efektivitas, dan keserasian. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan daerah, rasio efisiensi, rasio efektivitas, serta rasio keserasian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder berupa laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan rasio desentralisasi fiskal tergolong cukup baik, tingkat efisiensi berada pada kategori sangat efisien, sementara rasio efektivitas menunjukkan kinerja yang belum efektif. Selain itu, hasil perhitungan rasio kemandirian daerah mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Pekanbaru relatif rendah atau berada pada pola hubungan konsultatif. Namun demikian, proporsi belanja operasi masih lebih besar

dibandingkan belanja modal, sehingga penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik menjadi kurang optimal.

ABSTRACT

Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) is a crucial component in financing regional expenditures. A decline in PAD and the performance of local governments has a significant impact on the financial performance of the Pekanbaru City Government. This study aims to analyze the financial performance of the Pekanbaru City Government based on fiscal decentralization, regional financial independence, efficiency, effectiveness, and expenditure harmony ratios. The financial ratios employed in this study include the fiscal decentralization ratio, regional dependency ratio, efficiency ratio, effectiveness ratio, and harmony ratio. This research adopts a qualitative approach using a descriptive method. The data consist of primary data obtained through interviews and secondary data in the form of financial statements of the Pekanbaru City Government. Data analysis was conducted using the interactive analysis model developed by Miles and Huberman. The results indicate that the financial performance of the Pekanbaru City Government, as measured by the fiscal decentralization ratio, is categorized as fairly good. The efficiency ratio shows a very efficient level, while the effectiveness ratio reflects performance that has not yet reached an effective level. Furthermore, the calculation of the regional financial independence ratio indicates that the dependency level of the Pekanbaru City Government is relatively low and falls within a consultative relationship pattern. However, operational expenditure still dominates compared to capital expenditure, resulting in less optimal provision of facilities and infrastructure to support improvements in public welfare and the quality of public services.

PENDAHULUAN

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), visi, misi, dan program kepala daerah terpilih selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) yang berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Berdasarkan Renstra BPKAD Kota Pekanbaru periode 2023–2026, permasalahan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan secara optimal. Namun demikian, permasalahan tersebut telah menjadi fokus perhatian pemerintah daerah untuk diselesaikan melalui perumusan strategi dan kebijakan yang diharapkan mampu mendorong peningkatan PAD serta optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Peningkatan PAD dari tahun ke tahun mencerminkan tingkat komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian keuangan, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat diminimalkan. Terwujudnya kemandirian keuangan dan pertumbuhan PAD juga menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah, khususnya perangkat pengelola keuangan daerah, dalam mengelola keuangan secara efektif dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna memberikan manfaat, kesejahteraan, dan kepuasan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan suatu instrumen yang mampu mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam periode tertentu, sehingga masyarakat maupun pemerintah pusat dapat menilai apakah pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara optimal (Zarefar, 2025).

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis rasio keuangan, dengan memanfaatkan laporan keuangan sebagai sumber data utama dalam proses perhitungannya. Terdapat berbagai jenis rasio keuangan yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja, dengan tetap mempertimbangkan kondisi, situasi, serta ketersediaan data dan informasi. Hasil dari analisis rasio keuangan tersebut diharapkan mampu menggambarkan kondisi keuangan daerah secara objektif berdasarkan data yang diperoleh, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, BPKAD sebagai perangkat daerah memiliki kebutuhan akan alat ukur kinerja keuangan yang tepat, yang mampu menyajikan informasi keuangan secara jelas, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan otonomi daerah (Suharyono, 2025). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan BPKAD Kota Pekanbaru selama periode 2018–2023.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru pada periode 2018–2021 guna menganalisis kinerja keuangannya dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ditinjau dari Rasio Keuangan Kota Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang berlandaskan pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, serta teori organisasi. Dalam kerangka teori prinsipal–agen, dianalisis hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Pihak prinsipal memberikan mandat, baik secara eksplisit

maupun implisit, kepada pihak agen dengan harapan agen tersebut bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, khususnya dalam konteks pendelegasian tugas dan wewenang. Pendelegasian ini terjadi ketika individu atau kelompok sebagai prinsipal menunjuk pihak lain sebagai agen untuk bertindak atas nama dan demi kepentingan prinsipal.

Dalam konteks pemerintahan, pemerintah berperan sebagai agen yang bertanggung jawab dalam merumuskan strategi serta kebijakan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak prinsipal. Namun demikian, berdasarkan impossibility theory, dikemukakan bahwa penyajian informasi yang mampu memenuhi seluruh kepentingan pengguna laporan keuangan secara bersamaan merupakan hal yang sulit dicapai. Laporan keuangan yang disusun dengan baik menjadi salah satu indikator pencapaian kinerja yang diharapkan oleh prinsipal terhadap agen. Kebijakan dan strategi yang diterapkan pemerintah akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan serta pelayanan publik yang diberikan. Apabila pemerintah mampu menunjukkan kinerja yang baik, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat (Safitri, 2025). Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi pemerintahan yang mampu menyajikan informasi keuangan secara wajar, relevan, dan lengkap. Selain itu, perencanaan kegiatan dan penganggaran perlu diungkapkan secara memadai untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan keuangan yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan para pengguna.

Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan dirancang untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas pada periode tertentu, yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kegiatan ekonomi di Indonesia secara umum terbagi ke dalam tiga sektor, yaitu sektor privat, sektor publik, dan sektor nirlaba. Pada sektor publik, dikenal dua jenis entitas, yakni entitas akuntansi dan entitas pelaporan (Mujiono, 2017). Dalam akuntansi pemerintahan, entitas akuntansi merupakan unit pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, aset, dan kewajiban, serta menyelenggarakan pembukuan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Widodo, 2021). Sementara itu, entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada publik, yang dapat terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi.

Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (Perma, 2020). Secara substansial, laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan gambaran kinerja pengelolaan keuangan daerah pada periode dan tanggal tertentu. Keuangan daerah pada dasarnya mencakup seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Transparansi mencerminkan keterbukaan pemerintah daerah dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Akuntabilitas menekankan bahwa seluruh proses penganggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Prinsip value for money mencakup tiga aspek utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip ekonomi berkaitan dengan upaya memperoleh barang dan jasa dengan kualitas terbaik pada harga yang paling wajar. Efisiensi mengacu pada kemampuan menyelesaikan suatu kegiatan

dengan penggunaan sumber daya dan biaya seminimal mungkin. Sementara itu, efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian output terhadap tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis laporan keuangan merupakan proses pengkajian terhadap berbagai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan pada sektor bisnis dan sektor pemerintahan memiliki perbedaan mendasar, terutama pada objek dan tujuan analisisnya. Dalam melakukan analisis keuangan, diperlukan langkah-langkah tertentu untuk memperoleh gambaran kondisi keuangan yang akurat (Nana, 2020). Rasio keuangan merupakan salah satu alat analisis yang umum digunakan untuk mengukur hubungan atau perbandingan antara satu pos keuangan dengan pos keuangan lainnya. Dalam praktik pemerintahan, penggunaan analisis rasio keuangan masih relatif terbatas, sehingga secara teoritis belum terdapat standar baku terkait penamaan maupun metode pengukurannya.

Dalam konteks APBD, analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja keuangan pada suatu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan atau tren yang terjadi. Selain itu, perbandingan proporsi fiskal suatu daerah dengan daerah lain yang memiliki karakteristik dan potensi yang relatif sama dapat memberikan gambaran posisi keuangan daerah tersebut. Beberapa rasio yang dapat digunakan berdasarkan data APBD antara lain rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio kemandirian daerah, dan rasio keserasian.

Rasio desentralisasi fiskal merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diukur dengan membandingkan PAD terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini menggambarkan besarnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal mencerminkan kapasitas keuangan daerah serta kewenangan dalam menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai efisien apabila rasio yang dihasilkan berada di bawah 100 persen. Oleh karena itu, perhitungan biaya pemungutan pendapatan harus dilakukan secara cermat agar dapat dievaluasi tingkat efisiensinya. Pencapaian target pendapatan akan menjadi kurang bermakna apabila biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi pendapatan tersebut lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang direalisasikan.

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD. Kinerja keuangan daerah dinilai efektif apabila rasio efektivitas mencapai atau melebihi 100 persen. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, semakin baik kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatannya.

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan eksternal, yang ditunjukkan melalui perbandingan antara PAD dengan pendapatan yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pinjaman daerah. Semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal, maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian juga mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, yang ditunjukkan

melalui kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Tingginya partisipasi masyarakat tersebut dapat menjadi indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Rasio keserasian menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran antara belanja operasional dan belanja modal. Tidak terdapat standar baku mengenai proporsi ideal antara belanja operasional dan belanja modal, karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pembangunan dan besarnya investasi yang diperlukan. Apabila porsi belanja operasional lebih besar, maka alokasi belanja modal yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung lebih kecil, demikian pula sebaliknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang didukung oleh data kuantitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian tertulis atau lisan mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh tanpa melakukan generalisasi yang bersifat luas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber perantara. Data sekunder umumnya berupa dokumen atau laporan keuangan yang telah disusun dan diarsipkan oleh pihak terkait, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, wilayah administratif Kota Pekanbaru mengalami perluasan dari sekitar 62,96 km² menjadi kurang lebih 446,50 km² yang terdiri atas 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran dan pematokan lapangan oleh BPN Tingkat I Riau, luas wilayah Kota Pekanbaru ditetapkan sebesar 532,26 km².

Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi yang strategis karena berada pada jalur lintas timur Pulau Sumatra dan terhubung langsung dengan beberapa kota besar seperti Medan, Padang, dan Jambi. Wilayah administratif Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak di bagian utara dan timur, serta Kabupaten Kampar di bagian barat dan selatan. Kota ini dilalui oleh Sungai Siak yang membelah wilayah dari arah barat ke timur, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 5–50 meter di atas permukaan laut.

Kota Pekanbaru beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C hingga 23,0°C. Secara astronomis, Kota Pekanbaru terletak pada koordinat 101°14'–101°34' bujur timur dan 0°25'–0°45' lintang utara.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membandingkan realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah. Berdasarkan hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru selama periode 2018–2023, terlihat bahwa tingkat desentralisasi fiskal berada pada kategori cukup

hingga sedang. Pada tahun 2018, rasio desentralisasi fiskal tercatat sebesar 26,51 persen, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 29,73 persen. Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 26,42 persen, sebelum kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 29,23 persen. Pada tahun 2022 dan 2023, rasio desentralisasi fiskal meningkat ke kategori sedang, masing-masing sebesar 32,22 persen dan 32,33 persen.

Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kota Pekanbaru dalam membiayai pembangunan daerah melalui PAD masih berada pada kategori cukup menuju sedang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah belum optimal. Rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan PAD belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Akibatnya, Pemerintah Kota Pekanbaru masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD baru agar tingkat desentralisasi fiskal dapat terus meningkat.

Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi PAD digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola biaya pemungutan pendapatan secara optimal dibandingkan dengan realisasi PAD yang diterima. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi PAD Kota Pekanbaru selama periode 2018–2023, diperoleh nilai rasio yang seluruhnya berada di bawah 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan PAD Kota Pekanbaru tergolong sangat efisien.

Tingkat efisiensi yang tinggi tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menekan biaya pemungutan pendapatan tanpa mengurangi realisasi penerimaan PAD. Perencanaan anggaran yang baik, serta optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, menjadi faktor pendukung tercapainya efisiensi tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, terutama terkait rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat mengenai kewajiban perpajakan dan retribusi daerah.

Secara umum, semakin rendah nilai rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dari aspek efisiensi PAD berada dalam kategori sangat efisien, meskipun realisasi PAD masih menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun.

Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Pekanbaru selama periode 2018–2023, diperoleh rata-rata tingkat efektivitas sebesar 73,04 persen, yang termasuk dalam kategori tidak efektif.

Meskipun pada tahun 2022 tingkat efektivitas mencapai 95,1 persen dan tergolong cukup efektif, secara umum kinerja efektivitas PAD masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran PAD cenderung terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuan realisasi, serta masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran serta lebih memaksimalkan potensi sumber daya daerah yang ada, khususnya dengan memanfaatkan posisi strategis Kota Pekanbaru sebagai pusat kegiatan bisnis dan perdagangan.

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan eksternal. Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian Pemerintah Kota Pekanbaru selama periode 2018–2023, diperoleh nilai rata-rata sebesar 42,48 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah dan berada pada pola hubungan konsultatif.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih sangat dominan dalam struktur pendapatan daerah. Meskipun ketergantungan terhadap pemerintah pusat mulai berkurang, namun PAD masih belum mampu menggantikan peran dana transfer secara signifikan. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian keuangan daerah perlu menjadi fokus utama pemerintah daerah melalui optimalisasi pemungutan PAD serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Rasio Keserasian

Rasio Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang bersifat rutin dan memberikan manfaat jangka pendek. Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja operasi Pemerintah Kota Pekanbaru selama periode 2018–2023, diketahui bahwa proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih dialokasikan untuk belanja rutin dibandingkan dengan belanja pembangunan.

Tingginya proporsi belanja operasi, khususnya pada periode pandemi COVID-19 tahun 2020, disebabkan oleh kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi. Kondisi tersebut menyebabkan alokasi belanja modal menjadi terbatas.

Rasio Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang. Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja modal Pemerintah Kota Pekanbaru selama periode 2018–2023, terlihat bahwa proporsi belanja modal cenderung menurun dan relatif kecil dibandingkan dengan belanja operasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru masih perlu menyeimbangkan struktur belanja daerah dengan mengurangi porsi belanja rutin yang terlalu besar dan meningkatkan alokasi belanja modal. Peningkatan belanja modal diharapkan dapat mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru yang ditinjau dari rasio desentralisasi fiskal, efisiensi PAD, efektivitas PAD, kemandirian daerah, dan keserasian belanja, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah masih menunjukkan beberapa kelemahan. Tingkat kemandirian keuangan daerah tergolong rendah karena ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Dari aspek efektivitas PAD, kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum optimal akibat perencanaan anggaran yang belum realistis serta tingginya ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal. Sementara itu, dari aspek desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan

daerah berada pada kategori cukup, namun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil.

Di sisi lain, kinerja keuangan dari aspek efisiensi PAD menunjukkan hasil yang sangat baik, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola biaya pemungutan pendapatan secara efisien. Namun, dari aspek keserasian belanja, alokasi anggaran masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan alokasi belanja modal guna mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Anggi, A. A. S. (2022). Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. *Akuntansi Prima*, 4(1), 104-115. <https://doi.org/10.34012/japri.v4i1.2614>
- Harun, A., Triyadi, S., & Muhtarom, I. (2022). Analisis Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Ancika Karya Pidi Baiq (Tinjauan Sosiologi Sastra). *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 8(2), 466-474. <https://doi.org/10.30605/onoma.v8i2.1778>
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 14(2), 146-166. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>
- Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 25-35. <https://jurnal-akuntansi.polban.ac.id/>
- Mujiono, M., & Suharyono, S. (2017). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tax Amnesty. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 5(2), 158-166.
- Nana, D. M. (2020). Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bantan Tengah Tahun Anggaran 2019. *AKUNTANSI DAN MANAJEMEN Учредители: Политехник Негери Padang*, 15(2), 63-89.
- Perma, A., & Suharyono, S. (2020). Proses Penyusunan APB Desa Pemerintah Desa Tanjung Datuk Kecamatan Siak Kecil. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(2), 63-73.
- Safitri, D., Zarefar, A., & Zarefar, A. (2025). Environmental Management Accounting, Environmental Performance, and the Moderating Role of Female Leaders: Empirical Evidence in Indonesian MSMEs. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 4615-4624.
- Suharyono, S. (2020). Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 11-25.
- Suharyono, S., & Ananda, N. J. (2022). Implementasi Penyajian Laporan Keuangan BMT Abdurrah. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 57-63.
- Suharyono, S., & Zarefar, A. (2024). Sustainability Disclosure And Firm Performance: The Role Of CEO Power As Moderation. In *Proceedings of the 11th International Applied Business and Engineering Conference*.
- Suharyono, S. (2025). Penerapan Green Budgeting: Strategi Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9).
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>

- Widodo, T., & Suharyono, S. (2021). Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 17(1), 122-137.
- Zarefar, A., Astuti, D., & Sunarto, N. (2025). Good Corporate Governance, Sustainability Disclosure, and Firm Performance: Evidence from Indonesia. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 5003-5013.
- Zarefar, A., & Zarefar, A. (2023). Analysis of corporate governance and corporate sustainability performance in the Indonesian context. *Business: Theory and Practice*, 24(1), 137-147.